

Pencegahan Perdagangan Orang melalui Penguatan Kapasitas dan Kesiapsiagaan Pekerja Migran Indonesia

Askarmin Harun¹, Azmi², Asmen³, Muhardi⁴, Fanny Sona Avila⁵

Universitas Riau Kepulauan, Indonesia^{1,2,3,4,5}

{askarmin4@gmail.com¹, azmi.azmii123@gmail.com², asmenisme08@gmail.com³,
muhardi2muhardi@gmail.com⁴, vannysonavila@gmail.com⁵}

Submission: 2026-07-23		Received: 2026-09-30	Published: 2026-09-30
Keywords:	<i>Decision Making; Human Trafficking; Indonesian Migrant Workers; Prevention; Protection Governance.</i>	Abstract. Human trafficking among Indonesian Migrant Workers (IMWs) requires preventive approaches that not only provide information but also strengthen workers' ability to make decisions in risky situations. This community engagement program was motivated by the conditions of 43 IMW participants at the Embassy of the Republic of Indonesia in Malaysia, of whom 26 participants (60.5%) did not know at least two official assistance channels, 17 participants (39.5%) did not have complete copies of important documents, and 21 participants (48.8%) were concerned about losing their jobs or facing consequences if they reported a problem. The program aimed to improve IMWs' ability to recognize trafficking schemes, assess risks, determine risk-reduction actions, access assistance, and identify personal vulnerability and protection factors. The program was conducted from 16 to 19 July 2026 and involved 43 IMWs using a scenario-based approach through the Recognize the Scheme–Assess the Risk–Break the Chain–Access Assistance model. The activities included scenario analysis, red flag classification, assistance-pathway simulations, vulnerability and protection mapping, and reflection. Evaluation was conducted using Situational Judgment Test (SJT) Forms A and B, each consisting of eight scenarios. The results showed that the mean SJT score increased from 12.35 to 19.42 out of 24, representing a 57.3% increase, with the Wilcoxon test indicating a significant change and a large effect size ($p < 0.001$; $r = 0.88$). The accuracy of risk-indicator classification increased from 8.58 to 13.07 out of 15 cards, representing a 52.3% increase. The assistance-pathway simulation achieved a mean score of 3.40 out of 4. In addition, 90.7% of participants were able to identify at least two official assistance channels, while 83.7% were able to formulate a safe exit strategy. The program demonstrates that a scenario-based approach can strengthen IMWs' readiness to make decisions when facing human trafficking risks while supporting protection governance through clear, coordinated, and accessible assistance services.	
Katakunci:	<i>Pencegahan; Pengambilan Keputusan; Pekerja Migran Indonesia;</i>	Abstrak. Perdagangan orang pada Pekerja Migran Indonesia (PMI) memerlukan pendekatan pencegahan yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memperkuat kemampuan mengambil keputusan dalam situasi berisiko. Kegiatan pengabdian ini dilatarbelakangi oleh kondisi 43 PMI peserta di Kedutaan Besar	

<i>Perdagangan Tata Perlindungan.</i>	<i>Orang; Kelola</i>	Republik Indonesia di Malaysia, di mana 26 orang (60,5%) belum mengetahui sedikitnya dua kanal bantuan resmi, 17 orang (39,5%) belum memiliki salinan lengkap dokumen penting, dan 21 orang (48,8%) masih memiliki kekhawatiran kehilangan pekerjaan atau menghadapi konsekuensi ketika melapor. Kegiatan bertujuan meningkatkan kemampuan PMI dalam mengenali modus, menilai risiko, menentukan tindakan pengurangan risiko, mengakses bantuan, serta mengenali faktor kerentanan dan perlindungan personal. Kegiatan dilaksanakan pada 16–19 Juli 2026 dengan melibatkan 43 PMI melalui pendekatan berbasis skenario dengan model kenali modus–ukur risiko–putus rantai–akses bantuan. Tahapan kegiatan meliputi analisis skenario, red flag classification, simulasi jalur bantuan, pemetaan kerentanan dan perlindungan, serta refleksi. Evaluasi menggunakan Situational Judgment Test (SJT) Form A dan B, masing-masing terdiri atas delapan skenario. Hasil menunjukkan skor rata-rata SJT meningkat dari 12,35 menjadi 19,42 dari maksimum 24, atau meningkat 57,3%, dengan uji Wilcoxon menunjukkan perubahan signifikan dan ukuran efek besar ($p < 0,001$; $r = 0,88$). Ketepatan klasifikasi indikator risiko meningkat dari 8,58 menjadi 13,07 dari 15 kartu, atau 52,3%. Simulasi jalur bantuan memperoleh rata-rata 3,40 dari skala 4. Selain itu, 90,7% peserta mampu menyebutkan minimal dua kanal bantuan resmi dan 83,7% mampu menyusun strategi keluar yang aman. Kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis skenario dapat memperkuat kesiapan PMI dalam mengambil keputusan menghadapi risiko perdagangan orang serta mendukung penguatan tata kelola perlindungan melalui akses layanan yang jelas, terkoordinasi, dan mudah dijangkau.
---	--------------------------	---

1 Pendahuluan

Perdagangan orang pada pekerja migran tidak selalu diawali oleh penculikan atau kekerasan terbuka, tetapi dapat berkembang dari tawaran pekerjaan yang tampak wajar hingga menjadi situasi eksploitasi yang sulit ditinggalkan (Becucci, 2024). Proses tersebut dapat melibatkan penipuan dalam perekrutan, informasi pekerjaan yang tidak sesuai, biaya perekrutan yang membebani pekerja, penguasaan dokumen, pembatasan kebebasan, hingga pemaksaan kerja (Christ & V Helliar, 2021).

Di sisi lain, teknologi digital semakin dimanfaatkan untuk mencari, mendekati, menipu, mengendalikan, dan mengeksploitasi calon korban perdagangan orang (Sarkar & Shukla, 2024). Teknologi dapat digunakan oleh pelaku pada berbagai tahapan perdagangan orang, termasuk

identifikasi dan perekrutan calon korban (Gezinski & Gonzalez-Pons, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pencegahan perdagangan orang perlu dilakukan sedini mungkin, terutama dengan membekali pekerja migran kemampuan mengenali tanda-tanda risiko sebelum mereka masuk ke dalam situasi eksploitasi.

Kerentanan PMI terhadap perdagangan orang karena itu tidak cukup dipahami sebagai persoalan kurangnya informasi, tetapi juga sebagai persoalan kemampuan mengambil keputusan ketika menghadapi situasi yang tidak pasti (Bogdan, 2023). Seorang calon pekerja dapat mengetahui bahwa perdagangan orang merupakan kejahatan, tetapi tetap menerima tawaran yang berisiko ketika dihadapkan pada kebutuhan ekonomi, tekanan waktu, informasi yang tidak lengkap, atau kepercayaan terhadap perekrut. Perspektif internasional mengenai perdagangan orang menempatkan kerentanan sebagai salah satu unsur penting dalam strategi pencegahan (Sidun, 2025).

Palermo Protocol mendorong negara untuk mengambil langkah yang dapat mengurangi faktor-faktor yang membuat seseorang rentan terhadap perdagangan orang (Maharani et al., 2026). Oleh sebab itu, kegiatan pengabdian ini tidak diarahkan semata-mata untuk meningkatkan pengetahuan normatif mengenai perdagangan orang, tetapi untuk membangun kemampuan PMI dalam mengenali risiko, menilai situasi, menentukan tindakan, dan mengakses bantuan ketika menghadapi kondisi yang berpotensi mengarah pada eksploitasi.

Dalam perspektif Ilmu Pemerintahan, pencegahan perdagangan orang juga berkaitan dengan kemampuan negara membangun sistem perlindungan yang dapat dijangkau pekerja migran (Hoogesteyn et al., 2024). Kerangka *internasional prosecution, protection, and prevention (3P)* menempatkan pencegahan, perlindungan korban, dan penegakan hukum sebagai komponen yang saling melengkapi, dengan *partnership* sebagai unsur pendukung penting dalam membangun respons lintas sektor (Agwu et al., 2024). Kerangka tersebut relevan dengan kondisi PMI yang bekerja lintas wilayah negara karena perlindungan tidak dapat hanya mengandalkan individu, tetapi membutuhkan koordinasi pemerintah negara asal, perwakilan diplomatik, otoritas negara tujuan,

lembaga layanan, serta masyarakat. Dalam konteks Indonesia–Malaysia, penguatan kapasitas PMI menjadi bagian penting dari sistem tersebut karena pekerja merupakan pihak yang berhadapan langsung dengan tawaran pekerjaan, perekrut, pemberi kerja, dan perubahan kondisi kerja. Dengan demikian, pencegahan perdagangan orang perlu menghubungkan kapasitas individu dengan kapasitas kelembagaan perlindungan.

Keterbatasan pendekatan sosialisasi konvensional menjadi alasan penting digunakannya pembelajaran berbasis situasi. Penyampaian informasi dapat membantu peserta mengenali konsep dasar perdagangan orang, tetapi belum tentu menunjukkan kemampuan mereka ketika harus menentukan tindakan dalam situasi nyata. *Pendekatan Situational Judgment Test (SJT)* memungkinkan peserta menghadapi skenario yang merepresentasikan persoalan praktis dan memilih respons yang dianggap paling tepat. (Webster et al., 2020), melalui tinjauan sistematis dan meta-analisis, menunjukkan bahwa SJT dapat memberikan informasi tambahan di luar pengukuran pengetahuan dan kemampuan kognitif, meskipun efektivitasnya bergantung pada konteks dan tujuan penggunaannya. Dalam pengabdian ini, SJT tidak digunakan untuk seleksi individu, melainkan sebagai instrumen pembelajaran dan evaluasi kemampuan pengambilan keputusan dalam menghadapi situasi yang berpotensi mengarah pada perdagangan orang.

Empat puluh tiga peserta terdiri atas 24 perempuan dan 19 laki-laki. Kelompok usia terbanyak berada pada rentang 31–40 tahun, sedangkan lama bekerja dominan adalah dua sampai lima tahun. Peserta berasal dari pekerjaan domestik, manufaktur, konstruksi, jasa, perkebunan serta perikanan dan pekerjaan lain. Keragaman ini penting karena modus dan kapasitas keluar dari situasi berisiko berbeda menurut sektor. Pekerja domestik dapat mengalami isolasi di rumah pemberi kerja, pekerja konstruksi dan manufaktur dapat bergantung pada dokumen serta akomodasi yang dikendalikan perusahaan, sedangkan pekerja perikanan menghadapi mobilitas dan keterasingan lokasi kerja (Zainal & Barlas, 2022). (Strating et al., 2024) menunjukkan bahwasanya isolasi, utang, pengendalian mobilitas dan lemahnya koordinasi lintas negara dapat memperkuat eksploitasi pekerja di laut.

Sebelum kegiatan, 26 peserta belum dapat menyebutkan sedikitnya dua kanal bantuan resmi, 17 tidak memiliki salinan lengkap seluruh dokumen penting dan 21 menyatakan takut kehilangan pekerjaan atau menghadapi konsekuensi ketika melapor. Temuan tersebut konsisten dengan (Auguste et al., 2024) yang menunjukkan ketidakpercayaan, ketakutan terhadap dampak pelaporan dan kekhawatiran salah kasus dapat mengurangi tindakan. Kerentanan bukan hanya terletak pada keberadaan modus, tetapi pada hambatan untuk memeriksa, menolak, meninggalkan atau melaporkan situasi.

Kebaruan pengabdian ini terletak pada pengembangan pendekatan pencegahan perdagangan orang yang berorientasi pada pengambilan keputusan, bukan hanya penyampaian informasi. Pendekatan tersebut dirancang melalui model “kenali modus–ukur risiko–putus rantai–akses bantuan”, yang diterjemahkan ke dalam SJT Form A dan B, klasifikasi kartu red flags, simulasi jalur bantuan, serta pemetaan faktor kerentanan dan perlindungan peserta. Form A digunakan untuk memetakan kemampuan awal peserta dalam mengenali dan merespons situasi berisiko, sedangkan Form B digunakan untuk mengidentifikasi perubahan kemampuan setelah intervensi pembelajaran. Kartu *red flags* membantu peserta mengenali indikator risiko secara konkret, sementara simulasi jalur bantuan menghubungkan kemampuan mengenali risiko dengan tindakan yang dapat dilakukan. Pendekatan ini sejalan dengan rekomendasi ILO mengenai perlunya perangkat praktis untuk membantu pekerja mengidentifikasi risiko dan penyalahgunaan dalam proses perekrutan. Dengan demikian, kebaruan kegiatan bukan hanya pada materi yang disampaikan, tetapi pada integrasi identifikasi risiko, pengambilan keputusan, simulasi tindakan, dan akses perlindungan dalam satu model pembelajaran bagi PMI. Hasil kegiatan juga diarahkan untuk menghasilkan informasi mengenai perubahan kemampuan peserta dan faktor yang memengaruhi kesiapan mereka menghadapi risiko perdagangan orang.

Berdasarkan persoalan tersebut, kegiatan pengabdian bertujuan untuk: (1) meningkatkan kemampuan PMI dalam mengenali modus dan tanda awal perdagangan orang; (2) meningkatkan kemampuan menilai tingkat risiko dalam situasi migrasi dan pekerjaan; (3) melatih peserta

menentukan tindakan yang dapat memutus potensi proses eksploitasi; (4) meningkatkan kemampuan mengidentifikasi dan menggunakan jalur bantuan; serta (5) memetakan perubahan kemampuan peserta setelah mengikuti pembelajaran. Dengan tujuan tersebut, pengabdian diarahkan bukan sekadar membuat PMI mengetahui perdagangan orang, tetapi membangun kemampuan untuk mengenali risiko, menilai situasi, mengambil keputusan, dan mengakses perlindungan ketika menghadapi kondisi yang berpotensi mengarah pada eksploitasi.

2 Metode

Metode pelaksanaan. Kegiatan dilaksanakan pada 16–19 Juli 2026 di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malaysia dengan melibatkan 43 PMI dari beberapa sektor pekerjaan. Metode intervensi menggunakan pendekatan , yang dirancang dalam empat tahapan, yaitu *kenali modus, ukur risiko, putus rantai, dan akses bantuan*. KBRI berperan sebagai mitra dalam koordinasi, penyediaan tempat, informasi layanan, dan rujukan kelembagaan. Tim terdiri atas dosen dan mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan; dosen bertanggung jawab atas materi, etika, fasilitasi, dan penilaian, sedangkan mahasiswa mendampingi kelompok, mengelola kartu situasi, melakukan simulasi, dan mencatat hasil agregat. Pendekatan ini menempatkan pencegahan sebagai proses pengambilan keputusan yang meliputi pengenalan risiko, pengamanan diri dan bukti, serta akses terhadap layanan resmi.

Evaluasi menggunakan lima instrumen, yaitu *Trafficking Risk Situational Judgment Test (SJT)* Form A dan B, *Red Flag Classification Task*, simulasi jalur bantuan, peta kerentanan dan perlindungan personal, serta refleksi satu kalimat. SJT masing-masing terdiri atas delapan skenario dengan empat pilihan tindakan berskor 0–3 dan skor maksimum 24; Form A diberikan sebelum edukasi dan Form B setelah latihan. *Red Flag Classification Task* menggunakan 15 kartu yang dikategorikan menjadi aman, perlu diverifikasi, atau risiko tinggi. Simulasi jalur bantuan menggunakan empat kasus dengan rubrik skala 1–4 yang menilai pengenalan risiko, pengamanan diri dan bukti, ketepatan rujukan, serta urutan tindakan. Peta personal digunakan untuk mengidentifikasi sumber kerentanan dan perlindungan, sedangkan

refleksi digunakan untuk menangkap perubahan orientasi peserta tanpa meminta pengungkapan pengalaman sensitif secara rinci.

Tabel 1. Tahapan, Instrumen, dan Luaran Kegiatan

Tahap	Aktivitas utama	Instrumen	Luaran
Kenali Modus	Pengenalan pola rekrutmen menyesatkan dan contoh pesan	SJT Form A dan kartu situasi	Profil keputusan awal dan modus yang dikenali
Ukur Risiko	Klasifikasi aman–verifikasi–risiko tinggi dan diskusi	<i>Red Flag Classification Task</i>	Peta indikator risiko
Putus Rantai	Latihan pengamanan dokumen, bukti, transaksi, dan ruang aman	Skenario dan rubrik simulasi	Kemampuan memilih tindakan aman
Akses Bantuan	Penyusunan urutan rujukan dan simulasi komunikasi	Kasus jalur bantuan dan peta layanan	Rencana kontak dan urutan penanganan
Tindak Lanjut	Pemetaan kerentanan, dukungan, dan refleksi	Peta personal dan refleksi	Peta kerentanan–perlindungan

Data kuantitatif dianalisis secara deskriptif menggunakan rata-rata, simpangan baku, median, distribusi kategori, persentase, dan selisih skor. Skor SJT dikategorikan menjadi rendah (0–8), sedang (9–16), dan tinggi (17–24). Perubahan skor Form A dan B dianalisis menggunakan *Wilcoxon signed-rank test* karena data berpasangan dan tidak diasumsikan memiliki karakteristik interval sempurna, sedangkan ukuran efek dihitung menggunakan $r = Z/Nr = Z/\sqrt{N}$. Data klasifikasi kartu disajikan berdasarkan jumlah dan persentase jawaban tepat, sedangkan skor simulasi dihitung berdasarkan rata-rata rubrik. Data peta personal dan refleksi dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola kerentanan, sumber perlindungan, perubahan orientasi, dan kebutuhan layanan. Analisis inferensial digunakan sebagai evaluasi perubahan hasil kegiatan dan tidak dimaksudkan untuk melakukan generalisasi terhadap seluruh PMI di Malaysia.

3 Hasil

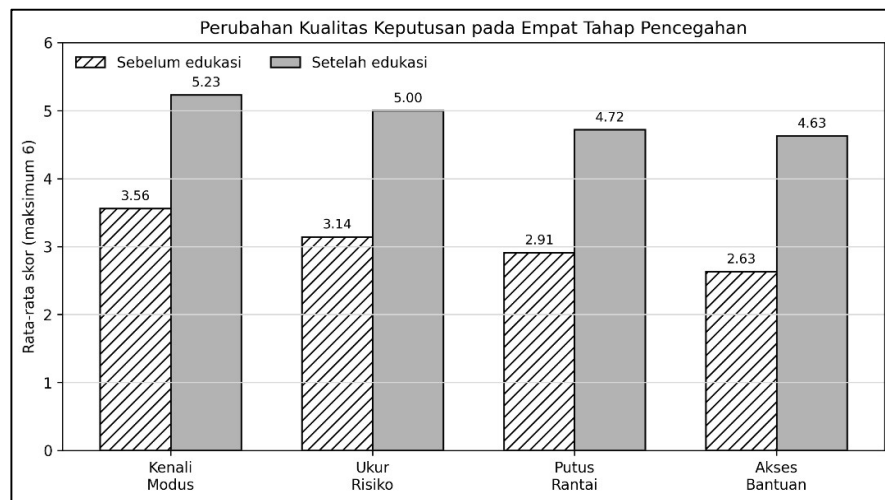
Hasil pengabdian kepada masyarakat ini dapat dilihat dari hasil Skor rata-rata SJT meningkat dari 12,35 (SD=2,45; median=12) menjadi 19,42 (SD=2,86; median=20) dari skor maksimum 24. Selisih rata-rata sebesar 7,07 poin setara dengan peningkatan 57,3% terhadap skor awal. Uji *Wilcoxon* menghasilkan $p < 0,001$ dengan ukuran efek $r = 0,88$, yang menunjukkan perubahan besar pada kualitas keputusan. Sebelum edukasi, dua peserta berada pada kategori rendah, 40 kategori sedang, dan satu kategori tinggi. Setelah edukasi, tidak ada peserta pada kategori rendah, tujuh berada pada kategori sedang, dan 36 atau 83,7% berada pada kategori tinggi. Target program sebesar minimal 75% pada kategori tinggi dengan demikian tercapai.

Perubahan terbesar tidak hanya tercermin pada skor akhir, tetapi pada alasan yang dipilih. Pada Form A, respons berisiko sering didasarkan pada kebutuhan mempertahankan pekerjaan, kepercayaan kepada perantara, asumsi dokumen dapat diurus kemudian, atau keinginan menyelesaikan persoalan tanpa melibatkan pihak lain. Pada Form B, lebih banyak peserta memilih memeriksa identitas pihak, meminta kontrak tertulis, menghentikan pembayaran, menyimpan komunikasi, mencari tempat aman, dan menghubungi kanal resmi. (Wang et al., 2023) menekankan keputusan dalam SJT dipengaruhi oleh cara seseorang mengevaluasi situasi dan mengenali kriteria yang relevan. Dengan demikian, edukasi menjadi efektif ketika peserta memahami bukan hanya jawaban benar, tetapi indikator yang harus dipertimbangkan.

Dimensi kenali modus mencapai skor akhir tertinggi, yaitu 5,23 dari maksimum 6. Peserta relatif cepat mengenali penahanan paspor, upah yang tidak dibayar, pembatasan komunikasi dan perubahan pekerjaan. Dimensi akses bantuan meningkat dari 2,63 menjadi 4,63, tetapi tetap menjadi capaian akhir terendah. Perbedaan tersebut memperlihatkan mengenali masalah lebih mudah daripada menentukan lembaga, urutan tindakan dan cara menyampaikan informasi. Tata kelola pencegahan karenanya tidak boleh berhenti pada kampanye *red flags*. Pemerintah perlu menyederhanakan jalur layanan, menjelaskan kewenangan, menyediakan respons awal yang aman dan memastikan pekerja tidak dipingpong antar instansi.

Tabel 2. Perubahan Skor SJT menurut Dimensi Pencegahan

Dimensi	Skor maksimum	Sebelum	Setelah	Perubahan
Kenali Modus	6	3,56	5,23	+1,67
Ukur Risiko	6	3,14	5,00	+1,86
Putus Rantai	6	2,91	4,72	+1,81
Akses Bantuan	6	2,63	4,63	+2,00
Total	24	12,35	19,42	+7,07



Gambar 1. Perubahan Kualitas Keputusan pada Empat Tahap Pencegahan

Gambar 1 memperlihatkan seluruh dimensi bergerak ke arah yang sama, tetapi tidak berakhir pada tingkat identik. Kenali modus menjadi fondasi karena peserta harus terlebih dahulu melihat pola tindakan, cara, dan tujuan eksploitasi. Ukur risiko menuntut kemampuan membedakan tidak nyaman kerja biasa, pelanggaran ketenagakerjaan serta situasi yang mengandung kontrol, penipuan, ancaman atau ketidakmampuan keluar. Putus rantai membutuhkan pilihan yang mengurangi kontrol pelaku tanpa memperbesar bahaya. Akses bantuan menambahkan aspek institusional: siapa yang dihubungi, bukti apa yang disiapkan dan apa yang dilakukan ketika layanan pertama tidak merespons.

Pada tugas klasifikasi 15 kartu, rata-rata meningkat dari 8,58 menjadi 13,07. Peserta paling mudah mengenali penahanan paspor dan upah, sedangkan indikator tersulit pada awal kegiatan adalah pembayaran biaya melalui rekening pribadi, penyembunyian alamat kerja, ancaman dilaporkan ke imigrasi, utang perekrutan yang berubah dan iklan bergaji tinggi tanpa proses verifikasi. Pola menunjukkan indikator berbentuk kontrol langsung mudah dikenali daripada pola manipulasi administratif dan digital.

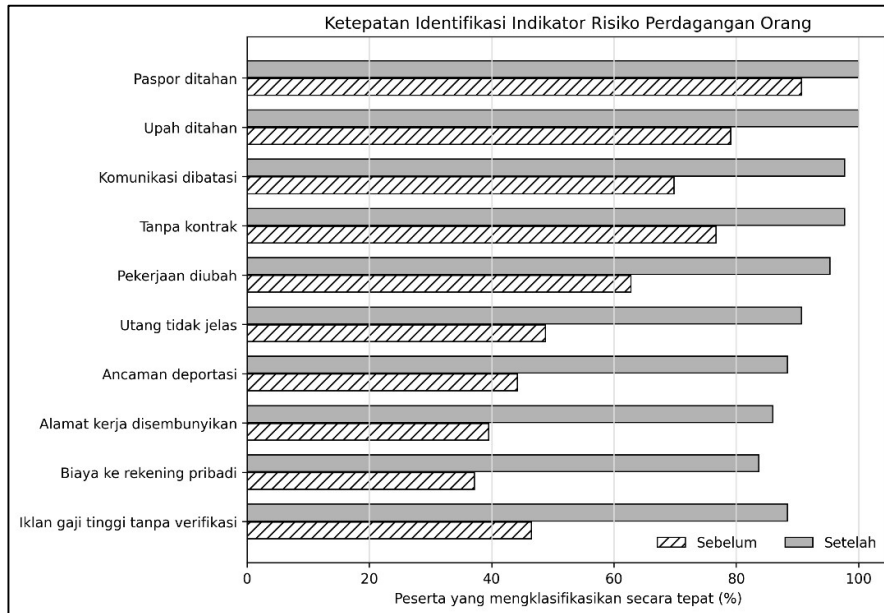
Penahanan paspor dikenali secara tepat oleh 90,7% peserta sebelum kegiatan dan seluruh peserta setelah kegiatan. Sementara itu, pembayaran melalui rekening pribadi hanya dikenali oleh 37,2% pada awal dan meningkat menjadi 83,7%. Sebagian peserta sebelumnya menganggap rekening pribadi sebagai praktik efisien karena perantara sering menyampaikan pembayaran harus dilakukan segera. Diskusi menunjukkan pentingnya memeriksa nama penerima, dasar biaya, bukti resmi, legalitas pihak dan kesesuaian nominal. (Blackstone et al., 2023) menemukan risiko kerja tersebar dalam rantai pasok yang luas, sehingga transparansi dan penyelidikan transaksi menjadi unsur pencegahan.

Ancaman deportasi sulit dinilai karena menggabungkan ketakutan terhadap status dengan kekuasaan pemberi kerja atau perantara. Setelah kegiatan, peserta memahami ancaman bukan bukti kewenangan pelaku. Respons yang aman adalah menyimpan pesan, tidak menyerahkan uang, dokumen tambahan dan memperoleh penjelasan dari institusi yang berwenang. Ketidakpastian status dapat menciptakan dilema yang menghambat akses perlindungan (Koesrianti et al., 2026). Layanan perlu menjamin konsultasi awal tidak otomatis berubah menjadi proses penghukuman, terutama ketika terdapat indikasi eksploitasi.

Tabel 3. Ketepatan Klasifikasi Sepuluh *Red Flags* Utama

Indikator risiko	Sebelum	Setelah	Perubahan
Paspor ditahan	90,7%	100,0%	+9,3 poin
Upah ditahan	79,1%	100,0%	+20,9 poin
Komunikasi dibatasi	69,8%	97,7%	+27,9 poin
Tanpa kontrak	76,7%	97,7%	+21,0 poin
Pekerjaan diubah	62,8%	95,3%	+32,5 poin
Utang tidak jelas	48,8%	90,7%	+41,9 poin

Indikator risiko	Sebelum	Setelah	Perubahan
Ancaman deportasi	44,2%	88,4%	+44,2 poin
Alamat kerja disembunyikan	39,5%	86,0%	+46,5 poin
Biaya ke rekening pribadi	37,2%	83,7%	+46,5 poin
Iklan gaji tinggi tanpa verifikasi	46,5%	88,4%	+41,9 poin



Gambar 2. Perubahan Ketepatan Identifikasi *Red Flags*

Gambar 2 menunjukkan edukasi tidak menghasilkan peningkatan yang seragam. Indikator yang telah dikenal luas mengalami kenaikan kecil karena capaian awalnya tinggi, sedangkan indikator yang terselubung dalam prosedur administratif mengalami kenaikan lebih besar. Hal ini mendukung penggunaan evaluasi per indikator, bukan hanya skor total. Apabila program menampilkan rata-rata, penyelenggara kehilangan informasi tentangodus yang masih membingungkan peserta.

Simulasi jalur bantuan menghasilkan rata-rata 3,40 dari skala 4. Pengenalan risiko memperoleh 3,56; ketepatan rujukan 3,49; pengamanan diri 3,42; pengamanan bukti 3,30; dan urutan tindakan 3,21. Capaian tersebut melampaui target 3,25, tetapi urutan tindakan perlu diperkuat. Peserta sering mengetahui beberapa langkah yang

benar, namun menempatkannya dalam urutan yang dapat memperbesar bahaya, yaitu seperti konfrontasi perekrut sebelum menyalin dokumen atau menghapus percakapan setelah melakukan blokir.

Pada skenario penahanan paspor dan upah, tindakan yang diharapkan bukan mengambil dokumen secara paksa. Peserta diminta mengamankan salinan, mencatat identitas dan lokasi, menyimpan bukti pembayaran atau percakapan, memberi dan mencari pendampingan. Pada skenario perekrutan digital, peserta berlatih menghentikan transfer, menjaga akun, menyimpan tautan dan nomor serta melapor melalui kanal resmi. Pada skenario perubahan pekerjaan, peserta diminta memperoleh dokumen, keselamatan, menghindari perpindahan tanpa informasi lokasi dan meminta verifikasi.

Ketepatan rujukan meningkat ketika peserta menggunakan matriks masalah–lembaga. KBRI ditempatkan sebagai pintu koordinasi konsuler bagi WNI, tetapi tidak menggantikan seluruh kewenangan otoritas Malaysia. Kepolisian relevan untuk ancaman atau kekerasan; otoritas ketenagakerjaan untuk persoalan hubungan kerja; layanan kesehatan untuk kebutuhan medis; bantuan hukum untuk pendampingan; dan komunitas tepercaya untuk dukungan logistik. Kolaborasi anti-perdagangan orang memerlukan kejelasan manfaat, pembagian tugas, dan komunikasi (Khozin et al., 2025). Tanpa pemetaan kewenangan, warga dapat mengalami rujukan berulang dan kehilangan kepercayaan.

Tabel 4. Hasil Simulasi Jalur Bantuan

Aspek	Rata-rata (1–4)	Interpretasi
Pengenalan risiko	3,56	Sangat baik; peserta mampu menemukan inti ancaman dan kontrol
Pengamanan diri	3,42	Baik; sebagian masih perlu arahan untuk menghindari konfrontasi
Pengamanan bukti	3,30	Baik; bukti digital dan dokumen sudah dipahami, tetapi belum selalu lengkap
Ketepatan rujukan	3,49	Baik; peserta mampu membedakan fungsi beberapa layanan
Urutan tindakan	3,21	Cukup baik; aspek utama yang memerlukan penguatan
Keseluruhan	3,40	Baik dan memenuhi indikator program

Peta personal memperlihatkan faktor kerentanan yang paling banyak muncul adalah penggunaan informasi informal (31 peserta atau 72,1%), tekanan ekonomi untuk menerima pekerjaan (27 atau 62,8%), keterbatasan pengetahuan kontak (26 atau 60,5%), ketergantungan kepada agen atau pemberi kerja (22 atau 51,2%), ketakutan kehilangan pekerjaan atau menghadapi akibat pelaporan (21 atau 48,8%), perubahan atau tidak jelas kontrak (19 atau 44,2%) dan ketiadaan salinan lengkap dokumen (17 atau 39,5%). Tekanan ekonomi dapat mengurangi verifikasi; ketergantungan pada agen dapat membatasi akses dokumen; dan ketakutan kehilangan pekerjaan dapat menunda pelaporan.

Tabel 5. Faktor Kerentanan dan Perlindungan Peserta

Kategori	Faktor	Jumlah	Persentase
Kerentanan	Informasi kerja dari jaringan informal	31	72,1%
Kerentanan	Tekanan ekonomi untuk segera menerima pekerjaan	27	62,8%
Kerentanan	Belum mengetahui minimal dua kontak resmi	26	60,5%
Kerentanan	Ketergantungan pada agen/pemberi kerja	22	51,2%
Kerentanan	Takut kehilangan pekerjaan atau dampak pelaporan	21	48,8%
Kerentanan	Kontrak berubah/tidak jelas	19	44,2%
Kerentanan	Tidak memiliki salinan dokumen lengkap	17	39,5%
Perlindungan	Kontak keluarga/komunitas yang dapat dipercaya	34	79,1%
Perlindungan	Dokumen identitas dan kerja masih berlaku	29	67,4%
Perlindungan	Memiliki salinan digital dokumen	26	60,5%

Kategori	Faktor	Jumlah	Persentase
Capaian akhir	Mengetahui minimal dua kanal resmi	39	90,7%
Capaian akhir	Mampu menyusun strategi keluar yang aman	36	83,7%

Refleksi satu kalimat dikelompokkan ke dalam empat tema. Sebanyak 17 peserta menekankan pentingnya memverifikasi sebelum menerima tawaran atau perubahan kerja; 10 menyebut perlunya menjaga dokumen dan bukti; sembilan menekankan penggunaan bantuan resmi daripada menghadapi masalah sendiri; dan tujuh menyatakan akan menghentikan pembayaran atau komunikasi ketika pihak tidak dapat diverifikasi. Refleksi tidak diperlakukan sebagai bukti perubahan perilaku, tetapi menunjukkan pergeseran orientasi dari kepercayaan spontan menuju keputusan berbasis verifikasi, keselamatan, bukti dan rujukan.

Model akhir kegiatan terdiri atas empat tahap yang saling bergantung. Kenali Modus membantu peserta melihat penipuan, kontrol, eksploitasi, dan penyalahgunaan kerentanan. Ukur Risiko mencegah dua ekstrem: menormalisasi tanda berbahaya atau melabeli setiap masalah sebagai perdagangan orang. Putus Rantai mengubah pengetahuan menjadi tindakan mengurangi kontrol pelaku. Akses Bantuan menghubungkan kapasitas individual dengan kewajiban negara dan jejaring perlindungan. Jika salah satu tahap lemah, pencegahan menjadi tidak lengkap. Warga yang mengenali risiko tetapi tidak memiliki layanan tetap rentan; layanan yang baik tetapi tidak diketahui warga juga tidak efektif.

4 Pembahasan

Dari perspektif Ilmu Pemerintahan, model Kenali Modus–Ukur Risiko–Putus Rantai–Akses Bantuan menunjukkan bahwa pencegahan perdagangan orang tidak dapat ditempatkan semata-mata sebagai persoalan penegakan hukum, tetapi sebagai persoalan tata kelola perlindungan warga dalam seluruh siklus migrasi (Cena, 2026). Kapasitas PMI untuk mengenali modus dan mengambil keputusan aman perlu didukung oleh kapasitas kelembagaan dalam menyediakan informasi yang dapat dipercaya, pengawasan terhadap proses perekrutan, pelayanan konsuler, perlindungan ketenagakerjaan, mekanisme pengaduan, bantuan hukum, kesehatan, keimigrasian, serta pemulihan. Dengan demikian, model ini mempertemukan dua sisi tata kelola, yaitu kapasitas warga (*citizen capacity*) dan kapasitas negara (*state capacity*). Pendekatan tersebut sejalan dengan kerangka ASEAN yang melihat migrasi sebagai proses yang membutuhkan perlindungan dan tata kelola lintas tahapan, bukan hanya intervensi ketika masalah telah terjadi (“ASEAN Migration Outlook - Second Edition,” n.d.).



Gambar 3. Model Kenali Modus–Ukur Risiko–Putus Rantai–Akses Bantuan

Gambar 3 memperlihatkan bahwa keempat tahap tersebut bersifat siklikal dan saling berhubungan, bukan prosedur linear yang berhenti setelah peserta memperoleh informasi. Peserta yang memperoleh informasi baru dapat kembali menilai risiko; ketika risiko meningkat, tindakan pengamanan dan pencarian bantuan menjadi relevan; sementara perubahan situasi dapat mengharuskan pekerja kembali mengidentifikasi modus atau mencari jalur bantuan alternatif. Oleh karena itu, dukungan tata kelola ditempatkan sebagai fondasi seluruh tahapan. Kualitas keputusan individu tidak hanya ditentukan oleh pengetahuan, tetapi juga oleh tersedianya informasi resmi, kanal pelaporan yang aman, respons kelembagaan, koordinasi antarlembaga,

dan ruang perlindungan. Dalam konteks ini, model pengabdian tidak hanya berfungsi sebagai perangkat edukasi, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi kerangka audit sederhana untuk menilai apakah kebutuhan perlindungan tersedia pada setiap titik keputusan PMI, mulai dari perekrutan, keberangkatan, bekerja, menghadapi masalah, melapor, hingga memperoleh pemulihan.

Capaian program memperkuat penggunaan pendekatan berbasis skenario. Skor SJT meningkat dari 12,35 menjadi 19,42 atau sebesar 57,3%, 83,7% peserta mencapai kategori keputusan tinggi, rata-rata klasifikasi red flags mencapai 13,07 dari 15, dan simulasi jalur bantuan memperoleh skor 3,40 dari 4. Selain itu, 90,7% peserta mampu menyebutkan dua kanal resmi dan 83,7% mampu menyusun strategi keluar. Temuan tersebut menunjukkan adanya peningkatan pada kemampuan menerjemahkan informasi menjadi pilihan tindakan. Penggunaan SJT relevan karena instrumen ini memang dirancang untuk menghadapkan peserta pada situasi bermasalah dan meminta mereka menilai respons yang paling tepat. (Whetzel et al., 2020) menekankan pentingnya kejelasan skenario, relevansi konstruk, kualitas alternatif respons, dan kesesuaian format penilaian dalam pengembangan SJT. Sementara itu, Webster et al. (2020), melalui tinjauan sistematis dan meta-analisis, menemukan bahwa SJT memiliki validitas prediktif moderat dan pada umumnya memberikan informasi tambahan di luar tes pengetahuan dan kemampuan kognitif, meskipun validitasnya sangat bervariasi menurut konteks penggunaannya. Dengan demikian, peningkatan skor dalam kegiatan ini lebih tepat dipahami sebagai indikasi peningkatan kemampuan penilaian situasional setelah intervensi, bukan sebagai bukti bahwa peserta pasti akan berperilaku sama dalam situasi perdagangan orang yang nyata.

Temuan tersebut juga memperlihatkan bahwa pengetahuan tentang red flags belum otomatis menghasilkan kapasitas perlindungan yang lengkap. Peserta relatif mampu mengenali tanda seperti penahanan dokumen, penguasaan upah, pembatasan komunikasi, perubahan pekerjaan, atau jeratan biaya, tetapi keputusan berikutnya tetap bergantung pada tersedianya pilihan yang aman. Seorang pekerja mungkin mengetahui bahwa paspornya tidak boleh ditahan, tetapi

kemampuan untuk mengambil kembali dokumen tersebut dipengaruhi posisi tawar, ketergantungan ekonomi, ancaman pemberi kerja, status migrasi, dan akses terhadap pihak yang dapat memberikan perlindungan. Karena itu, hasil kegiatan mendukung pergeseran pendekatan dari “memberi tahu pekerja apa yang salah” menjadi “membekali pekerja dengan pilihan tindakan dan jalur bantuan ketika risiko muncul.” Perspektif ini penting dalam Ilmu Pemerintahan karena keberhasilan perlindungan tidak hanya diukur dari tersampainya informasi kepada warga, tetapi juga dari kemampuan institusi merespons ketika warga menggunakan informasi tersebut.

Dari sisi tata kelola, hasil peta kerentanan dan perlindungan memperlihatkan bahwa risiko PMI bersifat multidimensional. Tekanan ekonomi, ketergantungan pada agen atau pemberi kerja, keterbatasan kontak resmi, ketidaklengkapan dokumen, serta ketakutan melapor dapat mempersempit pilihan tindakan pekerja. Sebaliknya, dukungan keluarga dan komunitas, kepemilikan dokumen, salinan digital, pengetahuan tentang layanan, dan akses terhadap KBRI dapat memperluas pilihan perlindungan. Karena itu, kerentanan tidak tepat dipahami sebagai kelemahan personal pekerja, tetapi sebagai kondisi yang muncul dari interaksi antara individu, pasar kerja, jaringan perekrutan, kebijakan migrasi, dan kapasitas layanan publik. Implikasi praktisnya adalah program pencegahan perlu menghubungkan edukasi individual dengan penguatan ekosistem layanan, misalnya melalui kartu *red flags*, peta layanan multibahasa, daftar kontak resmi, simulasi pelaporan, serta mekanisme rujukan yang jelas.

Meskipun seluruh indikator program tercapai, hasil tersebut perlu dibaca secara proporsional. Evaluasi dilakukan dalam jangka pendek sehingga belum dapat memastikan keberlanjutan perubahan perilaku ketika peserta menghadapi tekanan nyata. Skor SJT juga mengukur kemampuan mengambil keputusan dalam situasi yang disimulasikan, bukan perilaku aktual atau prevalensi perdagangan orang. Selain itu, penggunaan laporan diri pada peta kerentanan dapat dipengaruhi oleh tingkat kenyamanan peserta dalam memberikan informasi, sedangkan peserta yang dapat hadir di KBRI kemungkinan memiliki akses layanan yang berbeda dengan PMI yang lebih terisolasi. Oleh sebab itu, penelitian

atau pengabdian berikutnya perlu menggunakan evaluasi longitudinal, pengukuran tindak lanjut beberapa minggu atau bulan setelah intervensi, serta melibatkan kelompok PMI dengan akses layanan yang berbeda. Evaluasi juga dapat diperluas dari perubahan skor individu menuju indikator kelembagaan, seperti waktu respons pengaduan, kejelasan alur rujukan, keterhubungan antarlembaga, dan keterjangkauan informasi layanan.

Dengan demikian, kontribusi utama kegiatan ini bukan hanya pada peningkatan skor pengetahuan atau SJT, tetapi pada pengembangan model edukasi pencegahan yang menghubungkan keputusan warga dengan kapasitas tata kelola perlindungan. Model Kenali Modus–Ukur Risiko–Putus Rantai–Akses Bantuan dapat dikembangkan sebagai perangkat edukasi sekaligus instrumen refleksi kelembagaan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kebutuhan PMI dan ketersediaan layanan. Ke depan, keberlanjutan model dapat diarahkan pada edukasi skenario secara berkala, simulasi koordinasi lintas lembaga, pembaruan peta layanan, evaluasi tindak lanjut, dan penguatan mekanisme pelaporan yang aman. Dengan pendekatan tersebut, pencegahan perdagangan orang tidak berhenti pada pesan kewaspadaan, tetapi berkembang menjadi sistem perlindungan yang menghubungkan kapasitas PMI dalam mengambil keputusan dengan kapasitas pemerintah dan lembaga terkait dalam memberikan respons yang cepat, aman, dan terkoordinasi.

5 Kesimpulan

Kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa pendekatan berbasis *situational judgment* mampu meningkatkan kemampuan PMI dalam mengenali risiko, memilih tindakan aman, dan mengakses jalur bantuan. Peningkatan skor SJT dari 12,35 menjadi 19,42 serta capaian klasifikasi *red flags* dan simulasi jalur bantuan menunjukkan bahwa pencegahan perlu diarahkan pada kemampuan mengambil keputusan, bukan hanya pemahaman konseptual. Namun, keterbatasan evaluasi jangka pendek dan karakteristik peserta yang tidak mewakili seluruh PMI perlu menjadi pertimbangan dalam membaca hasil. Oleh karena itu, rekomendasi program meliputi pelaksanaan edukasi berbasis skenario secara berkala,

penyediaan kartu *red flags* dan peta layanan multibahasa yang mudah diakses, penguatan simulasi jalur pelaporan, serta evaluasi tindak lanjut untuk mengukur keberlanjutan perubahan perilaku. Pada tingkat kelembagaan, diperlukan penguatan koordinasi antara KBRI, otoritas terkait di Malaysia, KP2MI, pemerintah daerah, layanan ketenagakerjaan, bantuan hukum, dan komunitas pendamping agar informasi, pelaporan, perlindungan, dan rujukan dapat diakses PMI secara cepat dan aman.

6 Pengakuan

Tim pengabdian menyampaikan terima kasih kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kepulauan, seluruh mitra pelaksana dan 43 PMI yang berpartisipasi dalam kegiatan. Apresiasi diberikan atas koordinasi, fasilitasi ruang, penyediaan informasi layanan dan keterlibatan aktif peserta dalam diskusi serta simulasi.

7 Referensi

- Agwu, P., Levy, S., & Okoye, U. (2024). Using Preventive, Protection, Prosecution and Partnership Framework to Explore the Successes and Constraints of Social Work to Address Sex Trafficking in Edo, Nigeria. *The British Journal of Social Work*, 54(1), 189–207. <https://doi.org/10.1093/bjsw/bcad189>
- ASEAN Migration Outlook—Second Edition. (n.d.). *ASEAN Main Portal*. Retrieved October 2, 2026, from <https://asean.org/serial/asean-migration-outlook-second-edition/>
- Auguste, M. E., Sokat, K. Y., Wigle, C., & Baglin, C. (2024). Reporting on human trafficking crimes: A national transportation survey. *Journal of Transportation Security*, 17(1), 7. <https://doi.org/10.1007/s12198-024-00277-5>
- Becucci, S. (2024). *Smuggling and Trafficking of Migrants in Southern Europe: Criminal Actors, Dynamics and Migration Policies*. Bristol University Press. <https://doi.org/10.51952/9781529222555>

- Blackstone, N. T., Rodríguez-Huerta, E., Battaglia, K., Jackson, B., Jackson, E., Benoit Norris, C., & Decker Sparks, J. L. (2023). Forced labour risk is pervasive in the US land-based food supply. *Nature Food*, 4(7), 596–606. <https://doi.org/10.1038/s43016-023-00794-x>
- Bogdan, L. (2023). Navigating Migration Risks: The Role of Risk Perception and Information Engagement Among Moldovans. *Journal on Migration and Human Security*, 11(4), 315–332. <https://doi.org/10.1177/23315024231201622>
- Cena, J. D. (2026). Integrated Criminal Policy Approaches to Preventing Violence Against Women and Children. *Interdisciplinary Journal of Religious and Multicultural Perspectives*, 2(1), 11–17. <https://doi.org/10.18415/91zh3w40>
- Christ, K. L., & V Helliard, C. (2021). Blockchain technology and modern slavery: Reducing deceptive recruitment in migrant worker populations. *Journal of Business Research*, 131, 112–120. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.03.065>
- Gezinski, L. B., & Gonzalez-Pons, K. M. (2024). Sex Trafficking and Technology: A Systematic Review of Recruitment and Exploitation. *Journal of Human Trafficking*, 10(3), 497–511. <https://doi.org/10.1080/23322705.2022.2034378>
- Hoogesteyn, K., McCallum Desselle, L., Barrick, K., Pfeffer, R., & Vollinger, L. (2024). The Intersection of Human Trafficking and Natural Disasters: A Scoping Review. *Trauma, Violence, & Abuse*, 25(4), 2877–2890. <https://doi.org/10.1177/15248380241227985>
- Khozin, M., Shodiq, M. F., & Aditya, D. S. (2025). Collaborative Governance in Preventing Human Trafficking Crimes. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 246–279. <https://doi.org/10.18196/jsp.v16i2.418>
- Koesrianti, K., Khan, S. R., Widiati, E. P., Ramli, L., & Maradona. (2026). A humanist approach to migration governance: Protecting irregular Indonesian migrant workers in Malaysia. *Cogent Social Sciences*, 12(1), 2652102. <https://doi.org/10.1080/23311886.2026.2652102>
- Maharani, N., Widagdo, S., Istiqomah, M., Puspitawati, D., & Anditya, A. W. (2026). Effectiveness of International Legal Instruments in

Preventing and Eradicating Human Trafficking: Palermo Protocol Implementation Study. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 1–20. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v9i1.15370>

Sarkar, G., & Shukla, S. K. (2024). Bi-Directional Exploitation of Human Trafficking Victims: Both Targets and Perpetrators in Cybercrime. *Journal of Human Trafficking*, 0(0), 1–22. <https://doi.org/10.1080/23322705.2024.2353015>

Sidun, N. M. (2025). Understanding and combating human trafficking: A psychological perspective. *American Psychologist*, 80(5), 787–797. <https://doi.org/10.1037/amp0001516>

Strating, R., Rao, S., & Yea, S. (2024). Human rights at sea: The limits of inter-state cooperation in addressing forced labour on fishing vessels. *Marine Policy*, 159, 105934. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2023.105934>

Wang, D., Oostrom, J. K., & Schollaert, E. (2023). The importance of situation evaluation and the ability to identify criteria in a construct-driven situational judgment test. *Personality and Individual Differences*, 208, 112182. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2023.112182>

Webster, E. S., Paton, L. W., Crampton, P. E. S., & Tiffin, P. A. (2020). Situational judgement test validity for selection: A systematic review and meta-analysis. *Medical Education*, 54(10), 888–902. <https://doi.org/10.1111/medu.14201>

Whetzel, D., Sullivan, T., & McCloy, R. (2020). Situational Judgment Tests: An Overview of Development Practices and Psychometric Characteristics. *Personnel Assessment and Decisions*, 6(1). <https://doi.org/10.25035/pad.2020.01.001>

Zainal, K. A., & Barlas, J. (2022). Mental health, stressors and resources in migrant domestic workers in Singapore: A thematic analysis of in-depth interviews. *International Journal of Intercultural Relations*, 90, 116–128. <https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2022.08.004>